

China, Indonesia, dan ASEAN: Suatu Tinjauan

Herdi Sahrasad

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

Email: sahrasad@yahoo.com

Abstract

China's history shows that China's acceptance of international norms comes not only from the national interest but also influenced by the political system and social values that have shaped its relationship with Southeast Asia over 2000 years. Today Southeast Asia is still based on the question of how to adapt to new developments in Asia that are uncertain about how to defend themselves against and manage their country to face global markets and national power that have imperial potential. There has been a considerable amount of history written these two centuries to remind the local leaders to cooperate with each other. It is time to consolidate Southeast Asian regional groupings that can protect the long-term interests of the region.

Sejarah China menunjukkan bahwa kesediaan China untuk menerima norma internasional tidak hanya bersumber dari kepentingan nasionalnya tetapi juga sebagai pengaruh dari sistem politik dan nilai-nilai sosial yang telah membentuk hubungannya dengan Asia Tenggara selama lebih dari 2000 tahun. Sekarang, Asia Tenggara tengah bertumpu pada suatu pertanyaan tentang bagaimana beradaptasi dengan perkembangan baru di Asia yang tidak memiliki kepastian akan bagaimana mempertahankan diri dan mengelola negara dalam menghadapi pasar global dan kekuatan nasional yang berpotensi mengarah pada imperialisme. Terdapat sejumlah besar sejarah yang ditulis dalam dua abad ini yang mengingatkan tentang pentingnya kerja sama antar pemimpin daerah. Kini, telah tiba saatnya untuk mengkonsolidasikan pengelompokan kawasan Asia Tenggara yang dapat melindungi kepentingan jangka panjang di kawasan tersebut.

Kata-Kata Kunci: China, ASEAN, Indonesia, IMF, Sinology

Pendahuluan

Akhir-akhir ini China makin menjadi sorotan dunia. Dari sisi ekonomi, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa pertumbuhan kredit China telah masuk dalam trajektori berbahaya. Dalam laporan terbarunya, IMF

menyatakan ada peningkatan risiko penyesuaian yang bersifat disruptif dan/atau perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi akibat ledakan kredit. IMF pun meminta China mengambil langkah untuk menurunkan ledakan kredit secara perlahan. Tanpa ledakan kredit, ekspansi ekonomi China akan secara signifikan lebih rendah.¹

Sejak krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi China melambat. Tiga dekade silam, pertumbuhan ekonomi China mencapai rata-rata 10 persen per tahun, namun pada tahun 2016 lalu hanya 6,7%. Pemerintah China telah memperkirakan perlambatan tersebut. Pasalnya, kisaran pertumbuhan ekonomi dua digit seperti dahulu tidak bisa berkesinambungan dalam jangka panjang. IMF menyatakan, dalam kurun waktu 2012-2016, pola utang dan kredit yang berkesinambungan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang melambat sebesar 2%. Laporan IMF menyingkapkan, kelompok debitur terbesar adalah BUMN, meski ada juga peningkatan besar pada utang pemerintah, kalangan usaha, dan rumah tangga.

Mengenai dinamika ekonomi China itu, di Indonesia, ada dua pendapat soal kemajuan China: Pertama, pihak yang optimis dan kedua, pihak yang pesimis. Kedua belah pihak memandang China dengan keheranan, kekaguman dan kegalauan, perasaan bercampur aduk akibat potensi ekonomi China yang bak pedang bermata dua: RRC bisa jadi pasar bagi ekspor Indonesia, namun juga sebaliknya Indonesia justru yang jadi pasar bebas bagi produk China.² Pandangan yang optimis dan pesimis itu, paralel dengan perdebatan panjang dan perbedaan para analis internasional dan sinolog dalam menganalisa tujuan dari kebijakan luar negeri China. Secara sederhana, terdapat dua tipologi pandangan/spektrum besar diantara kalangan yang melihat nuansa optimis dan yang pesimis dalam memaknai perilaku kebijakan luar negeri China (praktek politik dari kebijakan luar negeri yang dijalankan). Kalangan yang lebih optimis melihat bahwa manuver yang diperlihatkan China dalam perilaku internasionalnya yang terkadang dianggap mencemaskan, namun sebetulnya harus dilihat dalam konteks yang lebih besar. Mereka percaya bahwa China tidak akan mengorbankan stabilitas sebagai prasyarat dari pertumbuhan ekonominya. China dianggap akan sangat berhati-hati untuk memulai memicu konflik terbuka yang akan berdampak negatif tidak saja untuk kawasan tapi juga kemajuan ekonomi yang menjadi prasyarat untuk *China rising* (kebangkitan China).³

Pandangan kalangan analis dan sinolog yang pesimis melihat perilaku China yang assertif, sikap keras dan kaku/doktriner yang ditunjukkan dalam menanggapi isu-isu internasional dan regional sesungguhnya mencerminkan sikap percaya diri, kekuatan dan determinasi untuk meningkatkan posisi internasionalnya menuju keunggulan menjadi *superpower* yang dianggap sebagai ancaman serius dalam tatanan regional maupun internasional.⁴

Di antara dua spektrum ini, masih ada spektrum ketiga yang melihat bahwa perilaku kebijakan luar negeri China dalam isu internasional dan global tidak secara sederhana bisa dianalisa lewat analisa atau pandangan yang optimis atau pesimis semata. Persoalan ini sesungguhnya adalah kombinasi dari beragam perhitungan politik yang matang oleh elit pemimpin partai komunis China yang tidak hanya didasarkan hanya sebatas untuk mengejar kepentingan nasional. Sehingga pengambilan kebijakan luar negeri China tetap akan terus menjadi arena penting yang sangat bersifat politis- strategis.⁵

Kalangan yang pesimis melihat, China bisa runtuh ekonominya dan kemajuan China bisa ambruk. Mengapa? Ekonomi China tengah berada dibawah tekanan utang raksasa, nilainya mencapai 28,2 Triliun dolar AS, atau sekitar Rp. 366 ribu triliun atau sekitar 100 kali utang luar negeri Indonesia. Utang China telah meningkat dengan sangat pesat sejak tahun 2007. Besarnya peningkatan mencapai 20,8 Triliun Dolar.

China menguasai dua pertiga dari peningkatan utang global dalam rentang waktu tahun 2007 - 2014 sebesar 57 triliun dolar. Sekarang utang ekonomi China telah mencapai 286% GDP negara tersebut.

Seberapa bahaya kondisi ekonomi China? Menurut *Salamuddin Daeng, peneliti Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI - Jakarta)*, sebagian besar utang berkaitan dengan sektor properti, sekitar 40%-45% dari total utang. Dengan dana utang, perusahaan di negara tersebut membangun properti ugal ugalan yang menyebabkan terjadinya gelembung properti. Kota-kota baru dengan gedung-gedung megah, infrastuktur mewah. Apa yang terjadi? Kota-kota baru terancam menjadi kota hantu, gedung gedung megah berubah menjadi sarang burung wallet. Meski suku bunga sudah diturunkan dan harga properti juga merosot, namun tetap tidak laku sebagaimana ekspektasi pengembang.

Ekonomi China sedang menuju kejatuhan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 7% pada kuartal I 2015. Tahun depan diperkirakan hanya akan tumbuh 6% dan tahun-tahun berikutnya hanya akan mencapai paling tinggi 4%.

Kondisi ekonomi China merupakan alarm bagi ekonomi global. Mengapa? karena jika utang raksasa China jatuh maka puing puing bangunan utang akan menimpa kawasan asia tanpa ampun! Krisis 2008 yang melanda ekonomi AS akan kembali terulang di China.

Itulah mengapa *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank (WB)* secara terburu buru bergabung ke dalam *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* yang dibangun Pemerintah China. Bergabungnya lembaga keuangan global tersebut dalam rangka menopang kejatuhan ekonomi China yang cepat atau lambat pasti terjadi. Seluruh dana global dimasukkan ke AIIB, termasuk dana Indonesia yang ditempatkan di IMF pada era pemerintahan SBY lalu. Namun ingat, utang raksasa ekonomi China mungkin saja tidak tertolong.

Indikasinya, statistik lembaga pemeringkat hutang, Fitch, memperkirakan bahwa China bakal menghadapi krisis ekonomi akibat bangkrut roda uang perbankan dalam skala besar, karena jumlah pinjaman macet di China mungkin sepuluh kali lebih tinggi dari klaim resmi Beijing. Menurut laporan Fitch, 21% dari total pinjaman perbankan di China adalah "kredit macet," (NPL) yang berarti debitur/penghutang sedang macet untuk membayar cicilan. Pada saat yang sama, otoritas perbankan China mengklaim kredit macet hanya 1,8% saja. Selain itu, ketergantungan Beijing pada pertumbuhan kredit untuk memberikan peningkatan PDB jangka pendek bisa memperburuk masalah yang ada, Fitch menekankan, karena "akan meningkatkan masalah kualitas aset likuiditas dalam sistem keuangan."

Sampai dengan akhir 2015, utang China sudah 243% dari PDB nasional dengan prospek mencapai 269% bila utang terus tumbuh. Bandingkan dengan Indonesia yang rasio hutangnya hanya 40% dari PDB.

PDB adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Utang Indonesia hanya 40% dari total omset semua barang dan jasa yang diproduksinya. Sedangkan utang China sudah 2,5 kali lipat (243%) dari total produk yang dihasilkan China.

Data statistik terbaru juga mengungkapkan bahwa utang China akan meningkat sebesar 13% per tahun, melebihi laju pertumbuhan PDB China yang hanya 6,5% seperti yang sekarang.

Total likuiditas yang dibutuhkan untuk mengatasi kredit macet ini menembus \$2,1 Triliun Dollar, jika sektor keuangan negara ingin mencegah masalah ini segera mungkin. Namun jika dalam perspektif yang lebih panjang, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tertekan dan akan mengharuskan pemerintah mengambil beberapa langkah-langkah drastis seperti mengemplang hutang atau memperluas persyaratan pembayaran kewajiban.

Kondisi ekonomi China ini mirip dengan Amerika saat ini tapi dalam level yang agak sedikit lebih rendah. Diantara cara untuk mencegah kebangkrutan adalah dengan mencari sumber daya alam (SDA) baru yang berarti menginvasi negara lain, seperti halnya Amerika menginvasi Afghanistan, Iraq dan Libya. Dengan adanya pemasukan SDA baru, ekonomi bisa ditopang dengan likuiditas berbentuk mineral alam (baca minyak bumi dan emas). Makanya wajar jika China terus berupaya menguasai Laut China Selatan yang kaya dengan SDA.

Target pertumbuhan ekonomi China tahun ini dipangkas dari 7% menjadi 6,5%. Ini lampu kuning buat perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dalam tiga tahun belakangan ini, pertumbuhan ekonominya kembang-kempis. Hari Minggu (5/3/2017) seperti dikutip dari *BBC*, Perdana Menteri (PM) Li Keqiang mengumumkan Pemerintah China memangkas target pertumbuhan ekonominya dari 7% menjadi 6,5%.

Dulu, mungkin tak terlintas di benak pemimpin Komunis China Mao Zedong bahwa China akan seperti sekarang. Sebab, lebih dari setengah abad lalu, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, dasar komunisme yang "sama rasa sama rata" begitu ketat diajarkan. Proletariat, yang semula berarti kaum tak mempunyai, dijadikan dasar oleh Sang Ketua Mao sebagai falsafah hidup yang mau tidak mau-- harus ditaati.

Saking kentalnya ajaran itu di benak, para pengikut Mao yang setia siap membunuh babi milik tetangganya. Soalnya, babi itu adalah tanda dari kelas borjuis. Kendati mereka tahu Ketua Mao sendiri seorang karnivora sejati, yang gemar menyantap *hong shao rou* alias daging babi dipotong kotak-kotak, dimasak semur dengan kuah dari arak Shaoxing, gula, dan bumbu-bumbu pedas.

Tapi kita semua tahu, akhirnya, ajaran komunisme yang mengklaim "sama rata-sama rasa" itu dikalahkan. Dan ujung-ujungnya, munculah paham kapitalisme. Sejak diperkenalkan reformasi ekonomi tahun 1978, China muncul sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Bagi kalangan yang optimis, China adalah harapan baru pasca mundurnya ekonomi AS.

Pada 2013, RRC menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal *gross domestic product* atau produk domestik bruto (PDB), serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. China tercatat pula sebagai negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia, dengan belanja militer yang *wah*. Makanya, pantas, jika negeri dengan 1,4 miliar penduduk ini menjadi kekuatan terbesar di Asia dan bisa disejajarkan dengan negeri adidaya lainnya, Amerika Serikat (AS), misalnya.

Tapi, sekali lagi, dalam tiga tahun belakangan ini, pertumbuhan ekonominya kembang-kempis. Hari Minggu (5/3/2017) seperti dikutip dari *BBC*, Perdana Menteri (PM) Li Keqiang mengumumkan Pemerintah China memangkas target pertumbuhan ekonominya dari 7% menjadi 6,5%.

Angka ini masih mendingan dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan tahun 2016 yang hanya 6%. Inilah laju pertumbuhan ekonomi China yang paling lambat dalam 26 tahun terakhir.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, problema perekonomian China masih berkuat pada masalah penyelesaian utang yang sangat banyak. Tahun 2015 utang pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan swasta sudah mencapai US\$ 49,2 triliun. Bandingkan dengan cadangan devisanya yang US\$ 3,84 triliun. Jelas, ini perbandingan yang sangat *jomplang*. Padahal, cadangan devisa China itu terbesar di dunia.

Tahun lalu, rasio kredit macet perbankan China naik sangat tinggi. Bayangkan, hanya dalam satu kuartal kredit macet di perbankan China mengalami kenaikan sebesar US\$ 22,5 miliar. Sedangkan laba 16 bank ternama di China di tahun itu hanya tumbuh 2%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi China kemungkinan akan lebih rendah ke depannya, karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah masalah keuangan tambang batubara, dan kecenderungan produksi batubara untuk terus menyusut, setelah mulai menyusut. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah kesulitan dalam memperoleh pinjaman untuk ekspansi, ketika harga masih tampak agak rendah, dan prospek kenaikan lebih lanjut tidak muncul untuk menjadi sangat baik.

Alasan lain mengapa laju pertumbuhan ekonomi China bisa diperkirakan turun adalah situasi *overbuilt* saat ini sehubungan dengan bangunan apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan tambang batubara. Akibatnya, akan ada sedikit kebutuhan untuk bangunan baru dan operasi jenis ini. Alasan lain untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat adalah sikap proteksionis pertumbuhan mitra dagang. Alasan keempat adalah kenyataan bahwa banyak pembeli potensial dari barang, bahwa China tidak melakukan produksi dengan sangat baik secara ekonomi (dengan AS menjadi pengecualian utama). pembeli tersebut tidak mampu untuk meningkatkan pembelian impor mereka dari China dan sangat mungkin bahwa total konsumsi energi China pada 2017 akan menyusut. Jika ini terjadi, akan ada tekanan ke bawah pada harga bahan bakar fosil dunia. Harga minyak bisa jatuh, meskipun penurunan produksi telah dilakukan oleh OPEC dan negara-negara lain.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi China kemungkinan akan membuat masalah utang lebih sulit terpecahkan. Kita tidak boleh terlalu terkejut jika *default* utang menjadi masalah yang lebih signifikan, atau jika yuan jatuh relatif lebih dalam terhadap mata uang lainnya.

Tentu saja, jika China mengalami perlambatan ekonomi dampaknya akan menyebar ke negara-negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Penurunan permintaan dari negara itu beberapa tahun terakhir telah menekan ekspor Indonesia, terutama komoditas pertambangan, migas, dan perkebunan. Padahal, China dalam beberapa tahun ini merupakan pasar utama ekspor Indonesia.

Melambatnya perekonomian China juga memukul negara-negara di Amerika Latin, Australia, dan Jerman. Celaknya, dampak ini terjadi di tengah situasi perekonomian dunia sedang tertekan, kecuali AS. Sementara Eropa dan Jepang masih terus berjuang untuk keluar dari kesulitan ekonomi.

Kini, semua mata dunia sedang memandang perekonomian China. Kalau perekonomian China terus melambat, dampaknya tentu saja berbahaya bagi perekonomian dunia. Betul, perekonomian AS mulai agak membaik, tapi kebijakan Presiden Donald Trump yang sangat protektif bisa menyulut masalah baru.

China tentu saja tak mau pertumbuhannya terus melambat. Caranya? Cari pasar di luar Eropa dan AS. Inilah yang dikhawatirkan banyak pengusaha di dalam negeri dan beberapa menteri ekonomi. "China berpotensi

membombardir pasar tekstil dan elektronik di Tanah Air," kata seorang pejabat di Bappenas.

Sejak beberapa tahun ini Indonesia sudah menjadi lahan empuk beragam barang China, mulai dari peniti hingga mesin modal. Apalagi sejak diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-ASEAN (*ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA*) 1 Januari 2010. Maklum dengan bea masuk 0%, barang-barang China leluasa masuk ke Indonesia.

ACFTA memang membuat China makin bergairah menyerbu pasar Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan raksasa China terus hadir dalam berbagai pameran teknologi dan produk China di Indonesia. Hingga saat ini lebih 1.000 perusahaan China beroperasi di Indonesia, baik bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur dan sektor lainnya. Tak hanya Indonesia yang menjadi lahan empuk China. China juga sangat tergiur pasar negara-negara ASEAN lainnya.

Posisi ASEAN memang sangat penting bagi ekonomi dunia. Dengan jumlah penduduk lebih 600 juta jiwa dan sumber daya alam yang sangat berlimpah, ASEAN bakal menjadi penentu bagi masa depan Asia Timur dalam menggeser hegemoni ekonomi dunia. ASEAN juga akan menjadi pendukung ekonomi negara-negara industri Asia, seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Bagi China, misalnya, negara-negara ASEAN selama ini menjadi pemasok berbagai kebutuhan energi dan bahan baku. Sebaliknya bagi ASEAN, China juga pasar penting bagi ekspor mereka. ASEAN juga penting bagi India, karena 99% ekspor *crude oil* dari Brunei Darussalam untuk India. Sedangkan untuk CPO, 88% ekspor Kamboja dan 58% ekspor Indonesia ditujukan ke India.

Jika Masyarakat Ekonomi ASEAN terwujud, kawasan ini akan menjadi pasar tunggal raksasa dan basis produksi. Integrasi ekonomi ASEAN berarti dihapuskannya semua hambatan investasi dan perdagangan, baik tarif maupun nontarif. Inilah pasar raksasa yang akan dibidik China.

Celaknya, China sudah digadang-gadang menjadi tulang punggung modal untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur Indonesia. Bahkan untuk maksud itu, China sudah berkomitmen untuk memberikan pinjaman sebesar US\$ 50 miliar atau sekitar Rp 750 triliun kepada Indonesia.

Kini, yang diperlukan adalah bagaimana mencegah dampak buruk guncangan ekonomi China, juga bagaimana RI bisa mengendalikan arus buruh dari RRC itu. Tak kalah pentingnya koordinasi antara kementerian/ lembaga harus ditata baik, termasuk sikap para elite dan politisi yang sering "lalai, korup dan ceroboh" dalam menghadapi arus barang, modal dan manusia dari China. Yang jelas, industry dalam negeri banyak yang sudah mati dihantam arus barang/komoditi dari China dan kita terancam jadi bangsa pariah di negeri sendiri.

Beijing dan Taipeh

Indonesia harus mencermati sejarah relasi Beijing dan Taipeh yang sedang berubah. Untuk pertama kali Presiden Taiwan Ma Ying-jeou bertemu Presiden China Xi Jinping di Singapura, Sabtu (7/11/2015). Ini merupakan dialog dan pertemuan pertama bersejarah antara pemimpin kedua negara, setelah sekian lama bersitegang karena ragam perbedaan dan benturan kepentingan.

Sejauh ini hubungan antarkedua negara sudah berjalan relatif baik, meski tidak mesra. Sejak 2002, China telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan. Hubungan perdagangan kedua pihak selama 2006 naik 15,4% menjadi US\$ 88,12 miliar. Adanya kultur *guangxi* (jaringan sosial) dalam peradaban China yang begitu kuat, memungkinkan hubungan China dan Taiwan lebih berpeluang untuk membaik, bahkan sangat mungkin Taiwan dan China bersatu kembali dengan model Satu China Dua Sistem ala Hongkong, yang bakal mewarnai Abad Asia.

Bagaimanapun, isu kemerdekaan Taiwan makin melumer tatkala pendekatan kultural China dan Taiwan dibangun kembali secara intensif. Abad Asia untuk sebagian ditentukan oleh keberhasilan modernisasi, stabilitas, perdamaian dan pembangunan di China, selain India, Jepang, Korsel dan ASEAN.

Dalam tataran budaya, Pemerintah China tidak pernah menutup pintu bagi warga Taiwan yang ingin berkunjung ke tanah leluhur, demikian juga sebaliknya. Jadi dalam level ekonomi atau kebudayaan, seolah tidak pernah ada konflik keduanya.

Di masa lalu China mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak 1949, ketika pemerintah nasionalis melarikan diri ke pulau itu setelah kalah oleh komunis. Pemerintah China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan mengancam akan menumpas setiap gerakan kemerdekaan dengan kekuatan militer. Sejak berakhirnya Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet awal 1990-an, ketegangan politik antara China dan Taiwan tetap menjadi isu panas dan serius di level mondial atau secara khusus di kawasan Asia Timur.

Namun, pertalian dua negara yang terpisah selat itu membaik sejak Presiden Ma menjabat pada 2008. Ahli China Tomy Su mencatat bahwa kalau kita membuka lembaran sejarah, konflik China-Taiwan merupakan warisan lama. Seperti diketahui pada 1912, Republik China berdiri dengan Ibu Kota Nanjing, menyusul revolusi yang dilancarkan Dr Sun Yat-sen dengan Kuomintang-nya yang menjatuhkan pemerintahan Dinasti Qing.

Lalu, 1 Oktober 1949 Mao Tse-Tung memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China menggantikan Republik China yang diproklamasikan pada 1912 dan menyatakan Taiwan sebagai provinsi di dalam RRC. Chiang Kai-shek yang mundur ke Taiwan tidak mengakui klaim itu. Masing-masing pihak mengklaim seluruh China sebagai wilayahnya.

Hingga 1970, posisi Taiwan di dunia internasional masih kuat, apalagi tren global yang dikomandani AS amat antikomunis. Namun, menyusul kunjungan Presiden Nixon ke Beijing pada 1971, AS mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing sehingga posisi RRC yang komunis itu menguat. Sedangkan pengaruh Taiwan di dunia terus menyusut.

Seperti dicatat Tomy Su, maka, kini bagi Ma, China-Taiwan lebih baik bekerja sama, mengingat keduanya mewarisi filosofi, tradisi, dan nilai kebudayaan yang sama. Sejak kecil Ma, yang kelahiran Hongkong amat doyan ajaran dan filosofi para filsuf klasik China, seperti Lao Tse, yang begitu menekankan pentingnya harmoni dalam kehidupan.

Namun, upaya Ma Ying-jeou menjalin kerja sama dalam harmoni dengan China daratan membuat sebagian kecil warga Taiwan diliputi kecemasan. Yang ditakutkan, para pelaku ekonomi asal China akan kembali menguasai Taiwan lewat jalur ekonomi. Tetapi Ma menjamin dia tidak akan menggadaikan Taiwan. Ma hanya yakin jika China dan Taiwan bisa bermitra secara sejajar, otomatis martabat Taiwan akan terangkat dengan sendirinya di mata dunia internasional. Pembukaan rute penerbangan langsung China-Taiwan merupakan realisasi janji Ma yang agaknya sudah muak dengan segala hal yang bersifat politik terkait relasi China-Taiwan. Agaknya Ma belajar banyak dari presiden yang digantikan, Chen Shui-bian.

Menurut Ma Ying-jeou atau akrab dipanggil Ma, normalisasi hubungan ekonomi dan budaya antara China dan Taiwan merupakan solusi paling masuk akal dan sama-sama menguntungkan. Konflik atau ketegangan politik terbukti tak pernah memberikan kontribusi apa pun.

Dengan demikian, pertemuan pemimoin China dan Taiwan di Singapura hari-hari ini, merupakan batu sejarah bagi tonggak hubungan baru Beijing dan Taipei yang lebih baik, dan implikasinya bagi perdamaian dan stabilitas di Asia, tentu terasa. Apakah ini tanda-tanda makin menguatnya pergeseran dari Abad Atlantik ke Abad Asia karena keberhasilan modernisasi ekonomi dan sosial di Asia? Ataukah rujuknya China-Taiwan sekadar menguatkan kepentingan China daratan dan diaspora China perantauan untuk kepentingan mereka semata karena ikatan nilai-nilai leluhur dan tradisi yang sangat tua?

Tentunya, harapan rakyat Asia dalah China berbagi kemakmuran bersama di Asia, bukan jadi predator dan negara tamak yang hanya menghisap sumber daya ekonomi masyarakat Asia. Dan melakukan hegemoni ala China, yang hanya menimbulkan frustrasi, kejengkelan dan dendam lama bangsa-bangsa Asia untuk kembali menoleh ke Barat, sekutu jauh yang tak lebih beradab, namun lebih maju dan kaya ilmu dan teknologi.

Respon Jokowi dan Perubahan Sikap China

Presiden Jokowi mengungkapkan, Jepang dan China kini sudah menjelma menjadi negara yang kuat dari sisi ekonomi. Ia menilai, Indonesia diuntungkan karena letak geografis yang diapit oleh negara-negara besar seperti AS, Jepang, dan China. "Sekarang kenyataan terjadi rivalitas itu. Dan kita berada pada pusaran pertarungan itu," kata Jokowi.

Persaingan ke depan akan meningkat dan terfokus pada sumber daya maritim, energi, serta pangan. Indonesia memiliki itu semua, menghadapi tantangan itu semua dan Jokowi berharap sumber daya nasional mampu mengelolanya agar keuntungan besarnya dapat dirasakan masyarakat. Mampukah Indonesia di bawah Presiden Jokowi memanfaatkan rivalitas China dan Jepang-AS di Asia Tenggara?

Sangat mungkin yang terjadi, justru sebaliknya. Justru China yang mau menelan Indonesia, sementara AS akan melawan pemangsaan itu dengan caranya sendiri pula. Oleh sebab itu, seruan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri agar kita kembali kepada UUD 1945, untuk sebagian besar akibat 'persaingan gajah' ala China-AS di Asia dan liberalisasi ekonomi-politik yang kebablasan pasca Orde Baru Soeharto.

Sesungguhnya, adakah istana presiden paham kita sedang dimana dan mau kemana kita? Betapa pentingnya para peneliti dan akademisi didengarkan suaranya oleh istana agar Indonesia tidak jadi 'pelanduk' yang mati di tengah pertarungan gajah-gajah.

Tiongkok menjadi tujuan pertama *blusukan* Presiden Joko Widodo ke luar negeri. Bagaimana peristiwa ini harus dimaknai dalam gerak maju hubungan Indonesia-Tiongkok? Ahli China, Yeremia Lalisang, mencatat ada tiga sektor strategis dalam lawawan Jokowi ini. Sektor pertama, Visi Presiden Jokowi soal kemaritiman, di mana dia ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebangun dengan rencana pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, membangun Jalan Sutra Maritim Baru (*New Maritime Silk Road*). Pejabat dan para pengamat Tiongkok dalam beragam kesempatan memaparkan bahwa rencana itu bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan kapasitas negara-negara di Asia Tenggara untuk memaksimalkan keamanan dan pengelolaan sumber daya maritim.⁶

Sektor kedua adalah kerja sama mengelola stabilitas kawasan. Isu ini amat terkait dengan kondisi terakhir sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan yang masih belum memiliki capaian signifikan setelah penandatanganan Deklarasi Tata Perilaku (*Declaration of Conduct of Parties*) pada 2002. Dalam masa kampanye lalu, Jokowi sempat menggarisbawahi posisi Indonesia sebagai negara bukan pengklaim (*non-claimant state*), yang kemudian dikonfirmasi mantan Menlu Marty Natalegawa. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dalam proses yang telah

berlangsung dalam usaha mengelola sengketa tersebut, Indonesia turut berperan aktif, bahkan telah mengambil berbagai inisiatif dengan maksud berkontribusi positif pada pengelolaan konflik. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa dinamika penyelesaian damai sengketa di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat tidak melibatkan Indonesia. Dalam hal inilah, peran dan sikap kooperatif Indonesia akan sangat bermakna bagi Tiongkok, yang dengan secara terbuka telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dialog damai.⁷

Sektor ketiga adalah kerja sama peningkatan hubungan antarwarga. Kini, hubungan internasional telah memasuki era yang di dalamnya interaksi antar bangsa tidak melulu didominasi interaksi pejabat resmi yang cenderung elitis. Sejauh ini, perkembangan-perkembangan penting dalam hubungan Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menunjukkan suatu interaksi kooperatif dan saling menguntungkan. Kepemimpinan nasional jelas memahami pentingnya hubungan baik dan bersahabat antara Indonesia dan Tiongkok. Gus Dur mengusulkan pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi menunjukkan pandangannya akan nilai strategis Tiongkok dalam mandala diplomasi Indonesia. Selanjutnya, dalam wacana publik, ikon kedekatan hubungan Indonesia-Tiongkok terpelihara melalui "diplomasi dansa" Megawati.⁸ Setidaknya, sampai akhir tahun 2017 ini, relasi Jakarta dan Beijing relatif mesra. Apalagi China memang belakangan ini bersikap akomodatif dalam kaitannya dengan masalah klaim pulau-pulau dan konflik kewilayahan di Laut China Selatan. Dalam analisis politik internasional perubahan sikap suatu negara menyangkut kepentingan strategis selalu terkait dengan kepentingan lebih luas dari negara tersebut. Perubahan sikap itu tidak serta-merta terjadi, tetapi telah dirancang secara matang.

Akademisi, Aleksius Jemadu, mencatat ada sejumlah faktor yang mendorong perubahan sikap itu. Pertama, China telah melakukan reklamasi masif di pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS). Selain itu, juga sudah dibangun fasilitas sipil dan militer yang canggih tanpa bisa dihalangi siapa pun. Artinya, secara *de facto* China telah mengontrol wilayah perairan itu dan akan mempertahankannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Kesediaan China untuk membahas COC pasca-KTT ASEAN di Manila harus diartikan untuk mengamankan kontrol *de facto* tersebut. Artinya, apa pun dapat dirundingkan asalkan tidak mempersoalkan keabsahan reklamasi yang sudah dilakukan serta semua fasilitas militer yang ada di dalamnya.⁹

Kedua, di tengah keengganan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump untuk memainkan peranan kepemimpinan secara global, China dengan senang hati mengisi kekosongan yang terjadi dan karena itu sangat memerlukan dukungan ASEAN demi mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Apalagi Presiden Trump sempat menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik di LCS yang langsung ditolak oleh Beijing. Jauh lebih mudah lagi untuk langsung berhadapan

dengan negara-negara ASEAN sambil mengandalkan kontrol *de facto* atas LCS tanpa campur tangan AS.

Ketiga, Beijing sudah memperhitungkan bahwa ada tiga sumber daya tawar (*bargaining power*) yang dimilikinya untuk menghadapi negara-negara ASEAN. Pertama, sebagaimana Jepang dan Korea Selatan yang merupakan saingannya di Asia Tenggara, secara perlahan, tetapi pasti China sudah menguasai perdagangan, investasi, dan pinjaman luar negeri di kawasan ini. Dalam hal perdagangan tidak diragukan lagi bahwa semua negara ASEAN memerlukan pasar China yang selalu menciptakan permintaan (*demand*) bagi produk-produk ekspor mereka apakah sumber daya alam atau produk industri lain. Negara-negara ASEAN tak siap menghadapi risiko ditutupnya akses pasar ke China dan bahkan mereka bersaing untuk memperebutkannya.

Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar rivalitas antara Amerika Serikat-Jepang-China dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dan menginginkan agar Indonesia menyiapkan diri untuk ambil bagian dalam rivalitas tersebut. "Manfaatkan rivalitas ini untuk kepentingan nasional kita," kata Jokowi.¹⁰

Tujuan utama dari kebijakan luar negeri China dan Indonesia/ASEAN adalah untuk menciptakan lingkungan internasional yang bisa berkontribusi positif pada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masing-masing. Hal yang sama juga menjadi tujuan kebijakan luar negeri Jepang dan Korea Selatan dan tetangga Asia lainnya. Kesamaan kepentingan antara China dan ASEAN dan tetangga di Asia ini harus dipelihara ke depan. Sehingga hubungan China dan Indonesia/ASEAN dan tetangga di Asia lainnya tidak menghadapi kerusakan dan distorsi yang mencelakakan.

Studi Wang Gungwu tentang sejarah China menunjukkan bahwa bahwa penerimaan China terhadap norma-norma internasional hadir tidak hanya dari kepentingan nasional tapi juga dipengaruhi oleh sistem politik dan nilai-nilai sosial yang telah membentuk hubungannya dengan Asia Tenggara lebih dari 2000 tahun. Saat ini Asia Tenggara masih didasarkan pada persoalan bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan baru di Asia yang bimbang tentang berbagai hal yakni bagaimana harus mempertahankan diri menghadapi dan mengatur negaranya untuk menghadapi pasar global dan kekuatan nasional yang memiliki potensi imperial. Sudah cukup banyak sejarah yang ditulis dua abad ini untuk mengingatkan pemimpin daerah tersebut agar bekerja sama satu sama lain. Sudah saatnya mengkonsolidasikan pengelompokan regional Asia Tenggara yang bisa melindungi kepentingan jangka panjang kawasan ini.¹¹

Di sinilah, pentingnya Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN. Indonesia di era Jokowi berkepentingan agar Beijing tetap memperhitungkan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini dan soliditas ASEAN lebih bisa menjamin stabilitas di kawasan sebab ASEAN adalah jangkar keamanan dan stabilitas di Asia, yang sebaiknya tidak diabaikan dan diremehkan oleh China.

Catatan Akhir

¹ Laporan BBC, 16 Agustus 2017.

² Herdi Sahrasad, "Ekonomi China Diambang Kehancuran?", <http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2422150/ekonomi-china-diambang-kehancuran>

³ Cheng Yongnian, "Nationalism: Dynamic of Domestic Transformation and International Relations in China", dalam Wang Gungwu dan Zheng Yongnian, *China and the New International Order* (London dan New York: Routledge, 2007). David Shambaugh, *Beautiful Imperialist: China Perceives America 1972- 1990* (Princeton: Princeton University Press, 2001). Ani Sucipto, "Memaknai Hubungan Cina-Amerika Kontemporer", dalam *Global & Strategis*, Januari-Juni 2014.

⁴ Thomas Robinson dan David Shambaugh, *Chinese Foreign Policy: Theory and Practice* (Clarendon: Oxford University Press, 1994). Wang Gungwu dan Zheng Yongnian, *China and the New International Order* (London dan New York: Routledge, 2007). Ani Sucipto, *loc. cit.*

⁵ Ani Sucipto, *loc. cit.*

⁶ Yeremia Lalisang, *Jokowi dan Hubungan RI-Tiongkok*, KOMPAS, 11 November 2014.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Aleksius Jemadu, *China dan Kode Tata Berperilaku*, KOMPAS, 30 November 2017.

¹⁰ Presiden Memberi Pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 16 Desember 2015.

¹¹ Wang Gungwu, "Keynote address Southeast Asia: Imperial Themes", dalam *International Journal of Asia Pacific Studies* 2017, 13 (2): 179-192.

Daftar Referensi

Gungwu, Wang dan Zheng Yongnian. *China and the New International Order*. London dan New York: Routledge, 2007.

Gungwu, Wang. "Keynote address Southeast Asia: Imperial Themes", dalam *International Journal of Asia Pacific Studies* 2017, 13 (2): 179-192.

Robinson, Thomas dan David Shambaugh. *Chinese Foreign Policy: Theory and Practice*. Clarendon: Oxford University Press, 1994.

Shambaugh, David. *Beautiful Imperialist: China Perceives America 1972- 1990*. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Sucipto, Ani. "Memaknai Hubungan Cina-Amerika Kontemporer", dalam *Global & Strategis*, Januari-Juni 2014.